



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2024**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024, Bupati Gayo Lues menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Gayo Lues.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.834.096.645.936
b. Belanja Daerah	<u>Rp.844.783.770.595</u>
Surplus/Defisit	Rp.(10.687.124.659)
c. Pembiayaan Daerah	
1) Penerimaan	Rp. 11.687.124.659
2) Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 10.687.124.659
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.834.096.645.936 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.57.829.810.502 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.530.726.000 (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.070.329.591 (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.563.729.067 (*Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.665.025.844 (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.776.266.835.434 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.733.332.733.371 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.934.102.063 (*Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 adalah Nol dikarenakan Dana Hibah BOS sudah masuk pada DAK Non Fisik pada Pendapatan Transfer.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.844.783.770.595 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.573.167.473.313 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.785.071.211 (*Tiga Ratus Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.250.427.553 (*Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.478.400.000 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.448.592.283 (*Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.204.982.266 (*Enam Milyar Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.109.521.758.782 (*Seratus Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.291.138.032 (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.931.988.070 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.81.458.242.356 (*Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.540.390.324 (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (*Enam milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.156.094.538.500 (*Seratus Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.077.872.600 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.155.016.665.900 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan;
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.687.124.659 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.11.687.124.659 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.687.124.659 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*Satu Milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah pada BUMD;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah;
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*Satu Milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(10.687.124.659) (*Minus Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.10.687.124.659 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- | | |
|---------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus; |
| Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagihasil; |
| Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan Kelompok Jenis, Objek Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; |
| Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gasalam / Tambahan DBH Minyak Dan Gas Bumi Menuruturusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; |
| Lampiran IX | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pada Daerah Perbatasan Rancangan Qanun Tentang Apbk Dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran Apbk Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara; |
| Lampiran X | Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan |
| Lampiran XI | Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). |

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

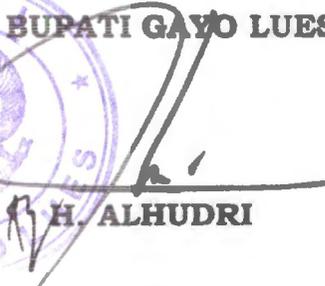
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

 **Pj. BUPATI GAYO LUES,**

H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 4 Januari 2023 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,

 **SETDA**
H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR 697



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 03 Tahun 2024

Tanggal : 4 Januari 2024

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.829.810.502,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.530.726.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	50.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	50.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	50.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	844.126.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	844.126.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	844.126.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	90.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	90.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	90.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.700.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.700.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.700.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.020.200.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.020.200.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.020.200.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	785.400.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	785.400.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	785.400.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.070.329.591,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	43.262.429.591,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	43.090.829.591,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.247.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	37.843.029.591,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	21.600.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	21.600.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	657.900.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	385.500.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	10.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	110.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	205.500.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	150.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	150.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	36.400.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	17.400.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	19.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	11.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	11.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.563.729.067,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.563.729.067,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.563.729.067,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.563.729.067,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.665.025.844,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.100.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	200.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	200.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	200.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	21.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	21.700.000,00
4.1.04.13.02.0023	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	10.000.000,00
4.1.04.13.02.0028	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan	11.700.000,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	3.343.325.844,00
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	3.343.325.844,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.238.325.844,00
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	1.100.000.000,00
4.1.04.22.01.0003	Pendapatan Shadaqah	5.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	776.266.835.434,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	733.332.733.371,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	581.537.313.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.887.201.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.674.767.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.238.663.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.817.678.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	698.958.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.356.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	7.680.451.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	69.695.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	4.530.447.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	459.844.896.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	319.383.837.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.309.652.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	49.380.059.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.511.451.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	53.259.897.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.201.981.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	451.353.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.546.654.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.099.870.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	632.516.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	300.000.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.743.760.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.632.985.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.587.517.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	855.432.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.245.969.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	105.925.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59.603.235.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.552.000.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	660.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.591.284.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.265.907.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.706.588.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.676.710.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	269.240.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.237.112.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	250.401.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.467.993.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	44.570.196.371,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	44.570.196.371,00
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	44.570.196.371,00
4.2.01.05	Dana Desa	107.225.224.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	107.225.224.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	107.225.224.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.934.102.063,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.934.102.063,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.934.102.063,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.631.649.815,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.170.653.884,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.042.936.079,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	32.991.615,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.055.870.670,00
	Jumlah Pendapatan	834.096.645.936,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	573.167.473.313,00
5.1.01	Belanja Pegawai	300.785.071.211,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	250.816.447.530,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	181.608.656.540,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	146.992.159.874,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.616.496.666,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.079.853.595,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.828.322.734,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.251.530.861,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.354.341.109,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.354.341.109,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.471.371.245,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.682.381.245,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.788.990.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.531.000.887,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.285.643.493,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.245.357.394,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.069.517.653,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.474.613.801,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.594.903.852,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	412.892.317,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	374.203.997,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	38.688.320,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.339.773,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.418.297,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	921.476,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.403.278.786,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.701.834.545,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.701.444.241,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	495.867.978,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	392.594.164,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	103.273.814,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.385.327.647,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.111.971.609,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	273.356.038,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.359.200.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.359.200.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.359.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.635.693.850,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	279.232.850,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	80.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	85.000.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	78.232.850,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	20.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	71.000.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	17.000.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	20.000.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	4.000.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.000.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.000.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	17.591.284.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	17.591.284.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.706.588.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.706.588.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.265.907.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.265.907.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.110.582.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.892.442.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	216.940.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.200.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	611.100.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	19.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	591.900.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.057.009.831,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	674.915.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	674.915.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	54.275.575,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	54.275.575,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	68.837.219,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	68.837.219,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	689.426.064,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	689.426.064,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	158.847.371,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	158.847.371,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.651.731,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.651.731,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.097.500.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.097.500.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	212.913.199,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	212.913.199,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.916.418.672,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	48.781.172,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	22.950.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	28.687.500,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.816.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.716.225.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.716.225.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	3.315.120.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	3.315.120.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	3.315.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.250.427.553,00
5.1.02.01	Belanja Barang	44.116.775.386,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.094.275.386,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	222.918.120,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.978.560.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.004.694.384,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.081.970.788,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.030.697.223,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	575.936.125,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	407.937.180,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.521.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.135.328.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.419.151.368,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.117.771.186,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	370.915.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	615.435.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.188.850.775,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	204.060.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	281.102.498,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.881.600,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	286.515.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	343.710.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.057.238.470,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.114.603.900,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.527.455.575,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.663.355.400,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	625.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.802.163.044,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	61.599.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.910.344.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	211.586.500,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	90.020.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	392.120.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	58.594.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	125.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.100.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	541.051.500,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	96.260.250,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	174.880.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	798.788.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	118.035.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	22.500.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	22.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	87.699.583.375,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.517.381.100,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.880.370.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.146.382.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.264.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	124.100.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	724.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	596.456.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.256.939.375,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	13.821.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.585.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	105.600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.409.600.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	172.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	330.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	258.225.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.314.200.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.522.700.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.688.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.316.700.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.114.200.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.287.800.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	153.200.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	3.273.445.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	87.400.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	175.350.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.725.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	50.906.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	498.697.860,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.007.974.865,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	228.401.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.314.900.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	69.404.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	190.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	171.999.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	180.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	917.033.800,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	311.400.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	29.900.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.600.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7.590.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.057.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	176.837.800,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	189.750.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	135.300.000,00
5.1.02.02.04.0450	Belanja Sewa Sepatu Lapangan	16.599.000,00
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	9.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.563.950.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	330.500.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.105.450.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	78.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.260.276.975,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.365.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	272.500.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	769.000.000,00
5.1.02.02.08.0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	771.750.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	378.846.975,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.389.020.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	71.500.000,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.092.660.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	176.550.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	176.550.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	195.000.000,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	195.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	357.500.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	357.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.687.891.500,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.484.370.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	203.521.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.763.909.925,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.209.437.000,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	6.325.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.441.670.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.403.500.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	238.470.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.160.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.440.000,00
5.1.02.03.02.0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	486.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	38.600.000,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.286.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.328.625.753,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.328.625.753,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.225.847.172,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.499.727.172,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.726.120.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.276.818.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.276.818.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.925.712.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	422.545.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	928.561.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.256.446.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.839.185.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	418.750.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	117.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.147.800.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	139.035.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	16.600.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.417.261.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.417.261.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.607.985.276,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.607.985.276,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.607.985.276,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.528.909.591,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.528.909.591,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.528.909.591,00
5.1.04	Belanja Subsidi	478.400.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	478.400.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	478.400.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	478.400.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	48.448.592.283,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	414.500.000,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	414.500.000,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	414.500.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	43.267.998.623,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.752.270.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.512.720.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.739.550.000,00
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	344.780.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	337.280.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.500.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.630.948.623,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	690.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.902.948.623,00
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.540.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.540.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.184.800.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.184.800.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.184.800.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	419.453.660,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	419.453.660,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	419.453.660,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.161.840.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	891.100.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	891.100.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	270.740.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	270.740.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.204.982.266,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.754.982.266,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.754.982.266,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.754.982.266,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	350.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	350.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	350.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2	BELANJA MODAL	109.521.758.782,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	300.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.291.138.032,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.254.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.750.000.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.750.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	504.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	504.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.735.012.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.735.012.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	850.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	185.012.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.700.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.477.354.230,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	344.336.550,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.339.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	331.997.550,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.861.244.600,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.135.732.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	199.815.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.873.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	511.824.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	271.773.080,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	31.200.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	128.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.523.080,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	70.850.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	16.200.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.867.650,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	185.375.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	180.000.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	5.375.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.492.650,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	15.492.650,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.015.916.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	200.000.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	200.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	815.916.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	815.916.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	106.776.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	56.776.000,00
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	56.776.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	50.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.318.829.715,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	473.350.695,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	44.200.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	429.150.695,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	845.479.020,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	129.110.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	716.369.020,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	74.250.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	74.250.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	74.250.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	384.911.037,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	384.911.037,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	384.911.037,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	723.221.400,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	723.221.400,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	723.221.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.931.988.070,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	12.110.043.570,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.062.043.570,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	387.535.710,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.359.587.660,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.329.169.050,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.244.945.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	140.806.150,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	500.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	940.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	160.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	48.000.000,00
5.2.03.01.02.0006	Belanja Modal Hotel	48.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	821.944.500,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	821.944.500,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	821.944.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.458.242.356,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	63.439.130.848,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	63.249.130.848,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	57.725.260.848,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	5.523.870.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	190.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	190.000.000,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.113.311.508,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.359.697.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.359.697.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.753.614.508,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.560.983.008,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	192.631.500,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	11.905.800.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	11.905.800.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	11.905.800.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.540.390.324,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	26.166.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	26.166.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	26.166.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	23.600.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.600.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	15.600.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	8.000.000,00
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	8.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.490.624.324,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.490.624.324,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.490.624.324,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00

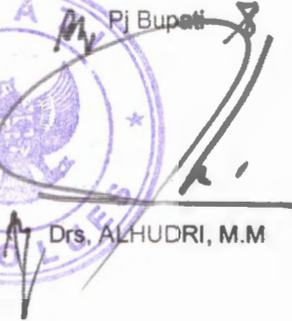
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	156.094.538.500,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.077.872.600,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	908.091.600,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	908.091.600,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	908.091.600,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	169.781.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	169.781.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	169.781.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155.016.665.900,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.525.000.000,00
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.525.000.000,00
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.525.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	152.491.665.900,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	152.491.665.900,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	7.439.371.980,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	107.225.224.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	37.827.069.920,00
	Jumlah Belanja	844.783.770.595,00
	Total Surplus/(Defisit)	-10.687.124.659,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.687.124.659,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.687.124.659,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	2.087.920.322,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	999.900,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	999.900,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	2.086.920.422,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	320.000,00
6.1.01.01.04.0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	2.086.600.422,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	9.599.204.337,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	9.599.204.337,00
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.095.000.000,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	3.951.823.937,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01 02.01.0129	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal	552.380.400,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02 02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	10.687.124.659,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gayo Lues, 4 Januari 2024



 Pj Bupati



 Drs. ALHUDRI, M.M